

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomik, misalnya keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen (IAI, 2015).

Adapun pengguna laporan keuangan beserta kepentingannya menurut IAI (2015), adalah sebagai berikut :

1. Investor

Investor membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas untuk membayar dividen.

2. Karyawan

Karyawan membutuhkan informasi mengenai profitabilitas dan stabilitas entitas, selain itu mereka juga membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa, imbalan pascakerja, dan kesempatan kerja.

3. Pemberi pinjaman.

Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.

4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya.

Pemasok dan kreditor usaha lainnya membutuhkan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

5. Pelanggan

Pelanggan membutuhkan informasi mengenai kelangsungan hidup entitas, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada entitas.

6. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya membutuhkan informasi mengenai alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas entitas. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas entitas, penetapan kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.

7. Masyarakat

Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (*trend*) dan perkembangan terakhir entitas beserta rangkaian aktivitasnya.

2.1.1. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Dalam IAI (2015), karakteristik kualitatif didefinisikan sebagai ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu :

1. Dapat dipahami

Salah satu kualitas penting informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Dalam hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis serta akuntansi dan kemampuan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, maupun masa depan, menegaskan atau mengoreksi, hasil pengguna di masa lalu.

3. Keandalan

Informasi yang diberikan juga harus bersifat andal (*reliable*), yang berarti informasi tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, adanya kesalahan material, serta dapat diandalkan oleh penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin saja relevan, namun jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Ketepatanwaktuan merupakan salah satu bagian dari karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan. Apabila laporan keuangan tidak dilaporkan dengan tepat waktu, maka akan kehilangan relevansi terhadap informasi yang dikandungnya. Ketepatanwaktuan sendiri yaitu tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Jika ketersediaan informasi tersebut terlambat, atau lama setelah suatu kejadian yang memerlukan tanggapan atau keputusan berlalu, menjadikan informasi tersebut tidak memiliki nilai lagi (Suwardjono, 2011).

2.1.2. Audit Laporan Keuangan

Auditing atau pemeriksaan akuntansi bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan karena tujuan akhir proses audit adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Selain itu, *auditing* juga merupakan salah satu bentuk atestasi. Atestasi merupakan suatu komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai reliabilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya (Agoes dan Hoesada, 2012). Tidak hanya itu, menurut Stamp dan Moonitz (1978) dalam Agoes dan Hoesada (2012) *auditing* juga dapat diartikan sebagai pengujian yang independen, objektif, dan mahir atas seperangkat laporan keuangan dari suatu perusahaan beserta dengan semua bukti yang mendukung. Hal ini dimaksudkan untuk menyatakan pendapat yang dapat dipercaya dalam bentuk laporan tertulis, mengenai apakah laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan kemajuan dari suatu perusahaan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Auditor sendiri adalah pihak ketiga diantara manajer dengan pemakai laporan keuangan lain, yang diharapkan dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan secara obyektif. Sebagai auditor, diperlukan sikap independen. Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika menjalankan tugas pemeriksaan laporan keuangan yang mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Hal ini juga berarti bahwa auditor harus bersikap jujur

dalam mengungkapkan fakta yang terjadi dalam perusahaan yang mungkin dilakukan oleh kliennya (Mulyadi, 2002).

2.1.3. Standar Audit Laporan Keuangan Berbasis ISA

Standar Audit (SA) mengatur tentang standar yang digunakan oleh praktisi saat melaksanakan kegiatan audit atas laporan keuangan. Pada ISA, tidak ada Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan seperti yang terdapat dalam SPAP. Standar-standar yang ada di ISA sudah mencerminkan proses pengerjaan auditing. Standar-standar tersebut dibagi kedalam enam bagian dan 36 standar (Tuanakotta, 2014).

Pendekatan pekerjaan audit di ISA dibagi ke dalam enam tahap. Tahap pertama (SA 200-299) dimulai dengan prinsip-prinsip umum dan tanggung jawab yang terbagi atas delapan standar audit. Tahap kedua (SA 300-499) yaitu penilaian risiko dan respons terhadap risiko yang telah dinilai, terbagi atas enam standar audit. Selanjutnya yaitu tahap ketiga (500-599) adalah menemukan bukti audit, dimana tahap ini terdiri atas sebelas standar audit. Tahap keempat (SA 600-699) yaitu penggunaan pekerjaan pihak lain yang terdiri atas tiga standar audit, dilanjutkan dengan tahap kelima (SA 700-799) yaitu kesimpulan audit dan pelaporan, yang terdiri atas lima bagian standar audit, dan yang terakhir adalah area-area khusus (SA 800-899), dimana bagian ini terdiri atas tiga bagian standar audit.

International Standard on Auditing (ISA) ini menekankan pada audit berbasis risiko, yang mewajibkan auditor untuk menjalankan konsep risiko dalam

setiap tahap audit. Selain itu, adanya perubahan dari *rules based* ke *principle based* yang mana hal ini merupakan perubahan besar dari standar-standar sebelumnya yang berbasis aturan. Selanjutnya, ISA juga berpaling dari model matematis dan menekankan penggunaan *professional judgment* yang memberikan konsekuensi pada keterlibatan auditor yang berpengalaman. Dan terakhir, audit berbasis ISA melibatkan peran *Those Charge with Governance* (TCWG) yang menekankan berbagai kewajiban entitas dan manajemen.

Standar Audit (SA) yang berkaitan dengan pelaporan keuangan adalah SA 700, yaitu standar mengenai perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Di dalam SA 700 ini disebutkan bahwa auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Auditor juga harus melakukan evaluasi terhadap laporan keuangan, dan pengevaluasian tersebut harus mencakup pertimbangan atas aspek kualitatif praktik akuntansi entitas, termasuk indikator kemungkinan penyimpangan dalam pertimbangan manajemen.

2.2. Total Lag

Dyer dan McHugh (1975) membagi lag atau rentang waktu menjadi tiga bagian, yaitu *preliminary lag*, *auditor's signature lag*, dan *total lag*. Dalam hal ini, *total lag* didefinisikan sebagai interval jumlah hari dari tanggal berakhirnya laporan keuangan, yaitu 31 Desember sampai dengan tanggal laporan dipublikasikan oleh bursa.

Ketepatan waktu (*timeliness*) diakui sebagai salah satu karakteristik fundamental laporan keuangan yang membuatnya menjadi berguna. Oleh karenanya, regulator selalu memperhatikan kebutuhan akan pelaporan keuangan yang tepat waktu, baik bagi investor dan pengguna laporan keuangan lainnya.

Peraturan Bapepam-LK No.KEP-347/BL/2012 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam-LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29/POJK/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir, dimana laporan tahunan tersebut harus memuat ikhtisari data keuangan penting, informasi saham (jika ada), laporan direksi, laporan Dewan Komisaris, profil emiten atau perusahaan publik, tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.

Sebagai pihak ketiga yang independen, adalah tugas dari seorang auditor yang diwakili oleh akuntan publik untuk menilai dan menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan emiten sebelum dipublikasikan ke publik, yang artinya sebelum adanya penilaian dari auditor, laporan keuangan dikatakan belum sah dan masih

diragukan (Wibowo, 2012). Dengan dipublikasikannya laporan keuangan emiten yang telah diaudit ke bursa saham merupakan titik resmi publikasi informasi akuntansi untuk dapat digunakan secara umum oleh investor dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam pengambilan keputusan. Apalagi untuk perusahaan *go-public* yang mengandalkan pendanaan dari penerbitan saham di pasar modal, ketepatanwaktuan dalam penerbitan laporan keuangan adalah hal yang krusial.

2.3. Komite Audit

Peraturan mengenai komite audit diatur dalam peraturan Bapepam LK nomor Kep-643/BL/2012 Kep-6, tanggal 07 Desember 2012, Peraturan nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, yang mana peraturan ini telah diperbaharui oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015. Adanya perbaharuan peraturan baru ini tidak terlalu berbeda dengan peraturan sebelumnya. Selain itu, peraturan KEP-117/M-MBU/2002 dan KEP-103/MBU/2002 yang mengharuskan setiap BUMN juga mempunyai Komite Audit.

Menurut peraturan tersebut, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris yang paling sedikit terdiri dari tiga orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar emiten atau perusahaan publik, serta diketuai oleh Komisaris Independen

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015). Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Wewenang dalam mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan
2. Wewenang dalam komunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit
3. Wewenang dalam melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Salah satu faktor penting yang dirasakan mempengaruhi transparansi perusahaan adalah aktivitas komite audit. Komite audit merupakan tempat terbaik bagi direksi untuk membahas masalah pelaporan laporan keuangan, mengidentifikasi solusi, dan melakukan tindakan perbaikan. Menon dan Williams (1994) dalam Khlif dan Samaha (2016) menemukan bahwa komite audit yang independen bisa saja menjadi tidak efektif jika komite tersebut tidak terlibat secara aktif. Secara umum, banyak studi empiris yang menemukan adanya efek dari pertemuan komite audit yang memberikan bukti bahwa mekanisme *governance* ini meningkatkan tingkat transparansi perusahaan. Misalnya, studi oleh McMullen dan Raghunandan (1996) dalam Khlif dan Samaha (2016),

membuktikan bahwa kehadiran dari komite audit dalam pertemuan berkontribusi dalam peningkatan reliabilitas laporan keuangan dengan cara mengurangi kesalahan yang signifikan dan adanya penyimpangan. Selama pertemuan komite audit, masalah yang ditemui dalam proses pelaporan keuangan akan dideteksi, namun jika frekuensi pertemuan tergolong rendah, maka masalah tersebut bisa saja muncul dan bisa saja tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, Allegrini dan Greco (2013) dalam Khlif dan Samaha (2016) menemukan bahwa jumlah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan dengan kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Khlif dan Samaha (2016) juga menemukan bukti bahwa jumlah pertemuan komite audit berkontribusi dalam mengurangi *reporting lag* dari pihak manajemen, atau dalam kata lain, *total lag*.

Agar mampu bekerja secara efektif, Komite Audit dibantu staf dan penasehat perusahaan dan auditor eksternal. Komite juga harus memiliki akses langsung kepada staf dan penasehat perusahaan seperti penasihat keuangan, dan penasehat hukum. Penasehat seperti ini dapat membantu anggota komite. Diantaranya, mendefinisikan peran dan tanggung jawab komite, tempat berkonsultasi menyangkut audit khusus atau isu lain yang mungkin muncul ketika komite melaksanakan tugas, dan melakukan pencarian fakta, pengkajian atau pengujian secara independen (Daniri, 2005).

Untuk membantu dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja di dalam perusahaan, Komite Audit juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan auditor eksternal, maupun internal. Termasuk menyetujui jasa audit dan non-audit yang dilakukan oleh para auditor perusahaan

publik. Dalam hal ini, memang secara tidak langsung Komite Audit berhubungan dengan pelaporan keuangan perusahaan, meskipun pihak yang terlibat langsung dan bekerja sama dalam pemeriksaan laporan keuangan dengan auditor eksternal adalah auditor internal, namun dengan adanya pengawasan dan komunikasi yang dilakukan oleh Komite Audit, maka juga akan berdampak dalam proses pelaporan keuangan yang layak.

Adapun komunikasi yang terjadi antara auditor eksternal dan Komite Audit yang merupakan bagian dari TCWG (*Those Charged With Governance*) nantinya merupakan bagian dari tahap pelaporan (*reporting*) dalam proses audit. Adapun tujuan dari auditor melakukan komunikasi dua arah dengan TCWG berdasarkan ISA 260.9 adalah sebagai berikut :

1. Mengkomunikasikan dengan jelas kepada TCWG mengenai tanggung jawab auditor berkenaan dengan audit atas laporan keuangan, dan tinjauan umum mengenai lingkup audit yang direncanakan dan waktu pelaksanaan audit yang direncanakan.
2. Memperoleh informasi yang relevan untuk audit, dari TCWG.
3. Memberikan kepada TCWG pengamatan yang berasal dari pelaksanaan audit (temuan dan informasi), yang penting dan relevan bagi tanggung jawab pengawasan umum atas proses pelaporan keuangan.
4. Mendorong komunikasi dua arah yang efektif antara auditor dan TCWG.

2.4. Internal Auditor

Ketepatan waktu perusahaan dalam melaporkan laporan keuangannya ke Bursa dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya ruang lingkup audit, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan keberadaan internal auditor. Bagi perusahaan yang telah mengoptimisasi fungsi dan peran auditor internalnya, memiliki kemungkinan untuk memperpendek durasi auditnya, yang berarti perusahaan dapat melaporkan laporan keuangan dan tahunannya dengan tepat waktu. Hal ini dikarenakan peran auditor internal itu sendiri adalah untuk membantu auditor eksternal dalam melakukan pekerjaannya, yaitu untuk menilai kewajaran laporan keuangan perusahaan.

Tujuan pengendalian internal sendiri secara garis besar dapat dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu (1) Strategis, sasaran-sasaran utama yang mendukung misi entitas, (2) Pelaporan keuangan (yang meliputi pengendalian internal atas pelaporan keuangan), (3) Operasi (termasuk di dalamnya pengendalian operasional atau *operational controls*), serta (4) Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal diatur dalam peraturan Bapepam nomor KEP-496/BL/2008 yang mana peraturan ini telah diperbaharui oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 56/POJK.04/2015. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan

cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan. Sedangkan unit audit internal adalah unit kerja dalam emiten atau perusahaan publik yang menjalankan fungsi audit internal. Jumlah auditor internal juga disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Semakin besar suatu perusahaan, maka masalah yang dihadapinya juga akan semakin meningkat, sehingga kondisi ini akan membutuhkan peran pengawasan dengan cara membentuk fungsi supervisor dalam struktur organisasi perusahaan, fungsi disebut juga sebagai audit internal, dimana fungsi ini terpisah dari fungsi-fungsi lainnya. Agar fungsi audit internal tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien, fungsi tersebut membutuhkan auditor internal yang kompeten dan independen. Kompeten berarti auditor harus memiliki keahlian dalam bidang *auditing* dan memiliki pengetahuan yang luas di bidang tersebut. Sedangkan independen adalah sikap mental yang tidak berpihak pada salah satu pihak, baik pihak manajemen maupun pengguna laporan keuangan (Astuti dan Kusharyanti, 2013).

Salah satu tugas internal auditor dalam suatu perusahaan adalah untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukupan struktur pengendalian internal perusahaan secara periodik dan membuat rekomendasi tentang perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Dalam proses pengauditan laporan keuangan tahunan ole akuntan publik, auditor internal akan sangat dibutuhkan dalam hal melakukan penilaian kualitas struktur pengendalian internal yang berkaitan dengan ruang lingkup proses pelaksanaan audit. Carslaw dan Kaplan (1991) menemukan bahwa

perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang kuat maka memerlukan waktu relatif singkat bagi auditor dalam melaksanakan pengujian ketaatan dan pengujian substantif, sehingga mempercepat proses pengauditan laporan keuangan dan meminimalisasi penundaan pengumuman laporan keuangan yang telah diaudit ke publik (Rachmawati, 2008).

2.5. Solvabilitas

Analisis solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi seluruh kewajiban-kewajibannya. Solvabilitas juga mengindikasikan jumlah modal yang dikeluarkan oleh investor dalam rangka menghasilkan laba. Perusahaan yang mempunyai rasio utang tinggi akan mengakibatkan besarnya jumlah utang dibandingkan dengan aset yang dimiliki perusahaan. Jika hal ini terjadi, perusahaan diduga akan terancam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya (Aisyah, 2007 dalam Ariani, 2014). Analisis solvabilitas umumnya diukur dengan cara menghitung *debt to assets ratio* yaitu rasio yang membandingkan antara total pinjaman dengan aset. Peningkatan *debt to assets ratio* disebabkan karena meningkatnya total utang (*debt*) dan meningkatnya total aset, namun peningkatan total utang lebih besar daripada peningkatan total aset. Rasio ini bisa digunakan sebagai indikator kesehatan suatu perusahaan (Ariani, 2014).

Carslaw dan Kaplan (1991) menyatakan bahwa proporsi relatif dari hutang terhadap total aset mengindikasikan kondisi keuangan dari perusahaan. Proporsi yang besar dari hutang terhadap total aktiva akan meningkatkan kecenderungan

kerugian perusahaan dan membuat auditor lebih berhati-hati terhadap laporan keuangan yang akan diaudit. Hal ini disebabkan karena tingginya proporsi dari hutang akan meningkatkan pula resiko kerugiannya. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat cenderung dapat melakukan kesalahan manajemen (*mismanagement*) dan kecurangan (*fraud*). Proporsi yang tinggi dari hutang terhadap total aset ini akan mempengaruhi likuiditas yang terkait dengan masalah kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) yang pada akhirnya akan memerlukan kecermatan yang lebih dalam pengauditan.

2.6. Afiliasi KAP

Audit atas semua laporan keuangan yang bertujuan umum di Indonesia dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP) kecuali atas organisasi pemerintah tertentu. Hak legal untuk melakukan audit diberikan kepada kantor akuntan publik oleh Menteri Keuangan. Kantor akuntan publik juga memberikan banyak jasa lain bagi klien, seperti jasa pajak dan konsultasi. Hanya kurang dari 500 kantor akuntan publik yang beroperasi di Indonesia yang besarnya berkisar dari 1 hingga 20.000 partner dan staf. Keempat KAP terbesar di Indonesia disebut kantor akuntan publik internasional “*The Big Four*” dan berafiliasi dengan auditor di Indonesia, yang terdiri dari :

1. *Ernst & Young* (EY) yang berafiliasi dengan Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.
2. *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan Sidharta & Widjaja.

3. *Deloitte Touche Tohmatsu* (Deloitte) yang berafiliasi Osman Bing Satrio & Rekan.

4. *PricewaterhouseCooper* (PwC) yang berafiliasi dengan Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan.

Keempat kantor ini memiliki cabang diseluruh dunia. KAP “*The Big Four*” ini mengaudit hampir semua perusahaan besar baik di Indonesia maupun dunia serta juga banyak perusahaan yang lebih kecil.

Beberapa KAP disebut kantor akuntan publik internasional “Lapis Dua” termasuk didalamnya adalah BDO Global, Grant Thornton International, RSM International, Praxity, Nexia International, Baker Tilly, Horwarth International, dan Moore Stephens International. Kantor-kantor akuntan publik tersebut cukup besar namun jauh lebih kecil daripada “*The Big Four*”. Mereka memberikan jasa yang sama seperti KAP “*The Big Four*” dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapatkan klien (Arens *et al.*, 2012).

KAP yang lebih besar (*The Big Four*) biasanya dianggap lebih mampu mempertahankan tingkat independensi yang memadai daripada rekan-rekan mereka yang lebih kecil karena mereka biasanya menyediakan berbagai layanan untuk klien dalam jumlah besar, sehingga mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu. Selain itu, KAP yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang lebih tinggi dan menikmati reputasi tinggi dalam lingkungan bisnis dan karena itu, akan berusaha untuk mempertahankan independensi mereka untuk menjaga *image* mereka (Nasser *et al.*, 2006).

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1	Wibowo (2012)	Variabel Independen : Ukuran perusahaan, profitabilitas, komisaris independen, komite audit, perubahan auditor, auditor eksternal, dan auditor's report lag Variabel Dependen : Total Lag	Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2006	Audit report lag dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, komisaris independen, audit komite, dan pergantian auditor, sedangkan total lag dipengaruhi oleh jangka waktu audit report lag dan ukuran perusahaan.
2	Wirakusuma (2004)	Variabel Independen : Ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, jenis industri, auditor internal, reputasi auditor, opini auditor, jumlah waktu pelaksanaan audit Variabel Dependen : Total Lag	132 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta	Ukuran perusahaan, profitabilitas, auditor internal, dan opini auditor berpengaruh terhadap total lag
3	Widati dan Septy (2008)	Variabel Independen : Ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, reputasi auditor, dan opini audit.	Perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ 45 di BEI tahun 2004-2006	Ukuran perusahaan, ROA, dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap rentang waktu pengumuman

		Variabel Dependen : Total Lag		laporan keuangan auditan.
4	Savitri (2010)	Variabel Independen : Komisaris Independen, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional Variabel Dependen : Total Lag	237 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2008	Komisaris Independen, kepemilikan manajerial, komite audit, kualitas audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.
5	Rachmawati (2008)	Variabel Independen : Profitabilitas, solvabilitas, internal auditor, ukuran perusahaan, dan KAP Variabel Dependen : Total Lag	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2003-2005	Ukuran perusahaan dan solvabilitas berpengaruh terhadap total lag
6	Ramadhani (2014)	Variabel Independen : Komite audit, reputasi auditor, ukuran perusahaan, dan tingkat leverage perusahaan	Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013	Jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap kecepatan pelaporan keuangan, leverage (DER) berpengaruh

		Variabel Dependen : Total Lag		negatif secara signifikan, sedangkan variabel reputasi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan.
7	Ariani (2014)	Variabel Independen : Komite Audit, ROA, Debt to total assets. Variabel Dependen : Audit Report Lag	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012	Komite audit dan ROA berpengaruh negatif, sedangkan <i>debt to total assets</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i>
8	Carslaw dan Kaplan (1991)	Variabel Independen : Ukuran perusahaan, jenis industri, <i>income</i> , <i>extraordinary items</i> , opini audit, auditor, tahun berhirnya laporan keuangan, kepemilikan perusahaan, dan proporsi utang Variabel Dependen : Audit Delay	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New Zealand tahun 1987-1988	Ukuran perusahaan dan proporsi utang berpegaruh secara signifikan terhadap audit delay
9	Utami (2006)	Variabel Independen : Ukuran perusahaan, jenis industri, lamanya perusahaan menjadi klien sebuah kantor akuntan publik, opini audit, laba/rugi, serta rasio hutang terhadap ekuitas	Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2000-2002	Ukuran perusahaan, jenis industri, lama emiten menjadi klien KAP, jenis opini auditor, laba/rugi, rasio hutang terhadap ekuitas, dan

		Variabel Dependen : Audit Delay		reputasi auditor berpengaruh terhadap audit delay.
10	Badriyah, dkk (2013)	Variabel Independen : Ukuran perusahaan, solvabilitas, kualitas audit, laba/rugi, opini audit, dan kepemilikan publik Variabel Dependen : Audit Delay	Perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2008-2013	Ukuran perusahaan, kualitas audit, dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap total lag, sedangkan laba/rugi dan opini auditor berpengaruh secara negatif, solvabilitas berpengaruh secara positif
11	Khliif dan Samaha	Variabel Independen : Komite audit dan ukuran auditor eksternal Variabel Dependen : Kualitas Pengendalian Internal	Perusahaan yang terdaftar di Egyptian Stock Exchange tahun 2007-2010	Aktivitas komite audit berpengaruh positif terhadap pengendalian internal, auditor <i>Big 4</i> berpengaruh terhadap peningkatan pengendalian internal perusahaan
12	Widati dan Septy (2008)	Variabel Independen : Ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, reputasi auditor, dan opini audit.	Perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ 45 di BEI tahun 2004-2006	Ukuran perusahaan, ROA, dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap rentang waktu pengumuman

		Variabel Dependen : Total Lag		laporan keuangan auditan.
13	Kuslihaniati dan Hermanto (2016)	Variabel Independen : Dewan komisaris independen, rapat dewan komisaris, independensi dewan direksi, rapat dewan direksi, rapat komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe perusahaan, kualitas audit. Variabel Dependen : Audit Report Lag	Perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2010-2014	Rapat komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe perusahaan, berpengaruh negatif. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh.
14	Astuti dan Kusharyanti (2013)	Variabel Independen : Kualitas pengendalian internal, internal auditor, kondisi keuangan, leverage, ukuran perusahaan, opini audit, kualitas audit. Variabel Dependen : Audit Delay	Perusahaan non-keuangan yang tercatat di BEI tahun 2012	Hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh negatif terhadap audit delay. Sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh.
15	Iskandar dan Trisnawati (2010)	Variabel Independen : Total aset, klasifikasi industri, laba/rugi tahun berjalan, opini audit, ukuran KAP, dan proporsi utang. Variabel Dependen : Audit Delay	Perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2003-2009.	Total aset, opini audit, serta proporsi utang tidak berpengaruh terhadap audit delay, sedangkan variabel lainnya berpengaruh.

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Komite Audit terhadap *Total Lag*

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 mendefinisikan Komite Audit sebagai komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa Komite Audit terdiri dari setidaknya tiga orang, yang diketuai oleh Komisaris Independen, dan wajib memiliki salah satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. Raghunandan, dkk (2001) dalam Wibowo (2012) menyatakan bahwa Komite Audit yang terdiri dari Komisaris Independen dan salah satu anggota yang berlatar belakang akuntansi atau keuangan di dalamnya memiliki kecenderungan untuk mengadakan pertemuan yang relatif lebih lama dengan kepala auditor internal, menyediakan akses privat bagi kepala auditor internal, dan mereview proposal audit internal dan hasil dari pengauditan internal.

Hal ini selaras dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang tertera dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015. Komite audit juga berperan penting dalam pemantauan pelaporan keuangan dan pengendalian internal dari sisi pemegang saham. Oleh karena itu, pengendalian internal perusahaan akan semakin baik dengan adanya Komite Audit, serta diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kepercayaan auditor eksternal terhadap pengendalian internal perusahaan, sehingga proses audit dan publikasi laporan keuangan ke bursa menjadi semakin cepat.

Peraturan-peraturan dalam ISA 260 juga menegaskan hal yang sama, dimana dalam ISA 260.11 disebutkan bahwa auditor wajib untuk menentukan orang (atau orang-orang yang tepat) di dalam struktur *governance* dalam entitas tersebut dengan siapa ia berkomunikasi. Selanjutnya dalam ISA 260.12 dan ISA 260.14 juga disebutkan bahwa auditor harus melakukan komunikasi dengan subkelompok TCWG, seperti Komite Audit, dalam rangka melaporkan proses dan hasil audit serta tanggung jawab auditor atas laporan keuangan (Tuanakotta, 2014).

Penelitian terdahulu yang mendukung adanya pengaruh keberadaan Komite Audit dalam ketepatanwaktuan pelaporan keuangan ke bursa adalah Wibowo (2012) yang menyatakan keberadaan Komite Audit sebagai implementasi penerapan prinsip GCG berpengaruh terhadap waktu penyelesaian audit yang secara kronologis akan mempengaruhi rentang waktu publikasi laporan keuangan. Savitri (2010) juga menemukan hal yang sama, yaitu adanya Komite Audit dalam sebuah perusahaan berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Semakin banyak jumlah Komite Audit dan semakin banyak tugas yang dilaksanakan Komite Audit, maka semakin tinggi kecepatan publikasi laporan keuangan tahunan, hal ini menunjukkan adanya pengawasan yang luas dan komunikasi yang baik antara anggota Komite Audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₁ : Keberadaan Komite Audit berpengaruh secara negatif terhadap *Total Lag*

2.8.2. Pengaruh Internal Auditor terhadap *Total Lag*

Tanggung jawab utama auditor eksternal yaitu memberikan opini atas laporan keuangan perusahaan. Sedangkan tujuan auditor eksternal adalah menentukan kewajaran penyajian posisi keuangan perusahaan dan hasil-hasil usaha untuk periode tersebut. Juga, mereka harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang ada, dan diterapkan secara konsisten dengan tahun sebelumnya, dan bahwa aktiva telah diamankan dengan semestinya.

Sedangkan auditor internal memberikan informasi yang diperlukan manajer dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Audit internal bertindak sebagai penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Auditor internal memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan risiko-risiko terkait dalam menjalankan usaha (Sawyer, 2006).

Meskipun dalam hal ini auditor internal modern memiliki cakupan yang luas, namun bentuk praktik audit saat ini terdiri atas empat kategori dasar, salah satunya adalah keuangan, dimana auditor internal berperan dalam menganalisis aktivitas ekonomi sebuah entitas yang diukur dan dilaporkan dengan menggunakan metode akuntansi.

Disebutkan dalam ISA 315 alinea 4c, pengendalian merupakan proses yang dirancang, diimplementasi, dan dipelihara oleh TCWG, manajemen, karyawan lain untuk memberikan asurans yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas

mengenai pelaporan keuangan yang andal/dapat dipercaya, efektif dan efisiennya operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Alinea 12 juga menjelaskan bahwa auditor diwajibkan untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit, karena memang tidak semua pengendalian internal memang relevan dengan laporan keuangan, oleh sebab itu, auditor dibutuhkan pertimbangan profesional auditor dalam memilah apa saja pengendalian laporan keuangan yang relevan. Auditor dapat menganalisis rancangan pengendalian yang ada di perusahaan kemudian dibandingkan dengan implementasinya. Selain itu, auditor juga dapat memperoleh informasi dengan bertanya kepada pihak-pihak dalam perusahaan (Tuanakotta, 2014).

Pengendalian internal yang relevan untuk suatu audit, khususnya ditujukan pada pelaporan keuangan. Hal ini berhubungan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan untuk keperluan eksternal (Tuanakotta, 2014). Ketika melakukan audit, auditor eksternal, sebagai mekanisme *eksternal governance*, memiliki wewenang untuk menilai sistem pengendalian internal perusahaan. ISA 315 dan ISA 330 merekomendasikan bahwa auditor eksternal harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal perusahaan untuk menilai resiko material salah saji dan *error* dalam laporan keuangan.

Adanya keberadaan auditor internal yang berkinerja baik, kooperatif, dan memiliki independensi tentu saja akan membantu auditor eksternal dalam mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperlukan dalam pembuatan laporan keuangan karena auditor internal merupakan pihak yang terlibat langsung dalam

proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan bisa saja tidak sesuai dengan standar, apabila pengendalian internal atas pelaporan keuangan tidak memadai.

Sejalan dengan hal tersebut, Krishnan (2005) mengemukakan bahwa keberadaan auditor internal dan sistem pengendalian internal yang baik merupakan alat yang penting bagi investor untuk menilai keandalan dan kecukupan pelaporan keuangan perusahaan. Pengendalian internal yang dilakukan oleh auditor internal yang berkinerja baik tentu saja akan memudahkan auditor dalam menyelesaikan proses audit sehingga perusahaan bisa menyampaikan laporan keuangan mereka ke bursa dengan tepat waktu. Wirakusuma (2004) juga meneliti pengaruh keberadaan auditor internal terhadap rentang waktu penyajian laporan keuangan ke publik, dimana variabel internal auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan perusahaan. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Rachmawati (2008). Berdasarkan teori yang ada serta penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₂ : Keberadaan Auditor Internal berpengaruh negatif terhadap *Total Lag*

2.8.3. Pengaruh Solvabilitas terhadap *Total Lag*

Solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua utangnya, baik dalam keadaan perusahaan masih berjalan maupun dalam keadaan dilikuidasi. Solvabilitas suatu perusahaan dapat diukur

dengan membandingkan jumlah utang dengan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan.

Proses pengauditan utang relatif memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan ekuitas, khususnya karena jumlah *debt holder*-nya yang lebih banyak (Wirakusuma dan Cindrawati, 2011), meskipun sebelum melakukan proses audit, auditor pasti telah mengukur dan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan dalam proses audit utang tersebut. Proporsi *debts to assets ratio* yang tinggi akan meningkatkan kegagalan perusahaan sehingga auditor akan meningkatkan perhatian bahwa ada kemungkinan laporan keuangan kurang dapat dipercaya. Kedua, proses audit utang dalam sebuah perusahaan memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mengaudit modal. Umumnya, dalam mengaudit utang melibatkan lebih banyak staf dan proses auditnya yang lebih rumit jika dibandingkan dengan mengaudit modal. Dalam hal ini, perusahaan akan mengurangi risiko dengan mengundurkan publikasi laporan keuangannya dan mengulur waktu dalam laporan auditnya. Hal ini memberikan tanda ke pasar bahwa perusahaan sedang dalam tingkat risiko yang tinggi. Dengan demikian, auditor akan mengaudit laporan keuangan dengan lebih seksama dan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama (Prabandari dan Rustiana, 2007 dalam Ariani, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Ariani menghasilkan bukti bahwa *debt to total assets* berpengaruh positif terhadap *audit report lag*, yang artinya semakin tinggi rasio *debt to total assets* perusahaan, maka semakin panjang *lag* auditnya. Penelitian yang dilakukan oleh Badriyah, et.al (2013) juga

menghasilkan hal yang sama. Berdasarkan teori dan penelitian yang ada, maka hipotesis yang dirumuskan adalah :

H₃ : Solvabilitas berpengaruh positif terhadap *Total Lag*

2.8.4. Perbedaan Afiliasi Kantor Akuntan Publik terhadap *Total Lag*

Pada umumnya, manajemen perusahaan akan mencari KAP yang berkualitas tinggi karena investor dan pemakai laporan keuangan cenderung mengandalkan reputasi auditor sebagai indikator kredibilitas laporan keuangan (Barton, 2005). *Expertise* KAP merupakan salah satu atribut dalam servis KAP besar. KAP lebih besar (KAP *The Big Four*) memiliki klien yang lebih banyak dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil, sehingga dapat mengurangi ketergantungan mereka pada klien tertentu dan dianggap sebagai jasa penyedia audit yang lebih dapat mempertahankan independensi. KAP *Big Four* juga membutuhkan waktu yang lebih pendek dibandingkan KAP *non-Big Four*, dimana dalam hal ini disebabkan adanya efisiensi waktu, insentif yang lebih tinggi, menjaga reputasi, serta kualitas SDM yang lebih baik yang dimiliki oleh kantor akuntan tersebut.

De Angelo (1981) dalam Wibowo (2012) menemukan bahwa kantor akuntan besar memiliki hasil kualitas audit yang lebih baik. Oleh karena itu, pihak manajemen akan segera menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit ke publik secara tepat waktu, yang artinya, rentang publikasi laporan keuangan menjadi relatif lebih cepat.

Teori-teori ini didukung oleh hasil penelitian yang ditemukan oleh Savitri (2010) dimana afiliasi KAP berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, atau dalam hal ini, perusahaan akan tepat waktu dalam pelaporan keuangannya dengan adanya KAP *Big Four*. Ketidapatuhan pelaporan keuangan lebih sering dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan auditor kecil atau *non-Big Four* (Schwartz dan Soo, 1996 dalam Savitri, 2010). Atau dengan kata lain, *timeliness* pada KAP *Big Four* akan lebih pendek dibandingkan dengan *timeliness* KAP *non-Big Four*, dimana hal ini selaras dengan hasil penelitian Utami (2006). Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₄ : KAP yang berafiliasi dengan *Big Four* memiliki *total lag* yang lebih pendek dibandingkan KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four*.